

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pola politik identitas yang dilakukan oleh Kelompok Sapta Darma dalam perjuangan keberadaan mereka sebagai salah satu kepercayaan yang ada di Kabupaten Brebes. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan signifikansi politik identitas yang dilakukan oleh kelompok Sapta Darma di Kabupaten Brebes melalui pola politik identitas. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi dalam bingkai perspektif pascastrukturalis dan paradigma konstruktivisme, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa politik identitas Kelompok Sapta Darma di Kabupaten Brebes merupakan bentuk perjuangan untuk memperoleh kesetaraan hak dan diakui sebagai salah satu kelompok keagamaan di Indonesia.

Perjalanan kelompok Sapta Darma dalam mencapai kesetaraan mengalami dinamika, sehingga dalam perjuangannya kelompok Sapta Darma membentuk strategi. Strategi yang dilakukan berupa advokasi dengan pendekatan *inclusive citizenship*. Diharapkan dengan pendekatan tersebut, dapat tercipta kesadaran tentang realitas sosial yang beragam, dan kehendak untuk mengakui serta menghidupi perbedaan demi terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Selain itu, *politics of recognition* yang dilakukan oleh kelompok Sapta Darma di Kabupaten Brebes memberikan alternatif dalam mencapai kesetaraan. Dalam hal ini, metode yang dilakukan adalah advokasi dan koperasi. Dua metode yang digunakan oleh kelompok Sapta Darma dalam mengenalkan keberadaan kelompoknya memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian kesetaraan dalam bidang pelayanan publik. Namun perjuangan politik identitas kelompok Sapta Darma tidak berhenti setelah putusan MK tentang adminduk, karena masih ada pelayanan publik yang belum bisa diakses oleh penghayat, yaitu terkait pelayanan pemakaman.

Kata Kunci: politik identitas, perjuangan, diskriminasi, Sapta Darma

ABSTRACT

This research article aims to understand and describe the pattern of identity politics carried out by the Sapta Darma Group in their struggle for existence as one of the beliefs that exist in Brebes Regency. And to find out and explain the significance of identity politics carried out by the Sapta Darma group in Brebes Regency through the pattern of identity politics. By using qualitative methods and ethnographic approaches in the frame of a post-culturalist perspective and constructivism paradigm, the results of this study reveal that the identity politics of the Sapta Darma Group in Brebes Regency is a form of struggle to obtain equal rights and be recognized as a religious group in Indonesia.

*The Sapta Darma group's journey in achieving equality experienced dynamics, so that in its struggle the Sapta Darma group formed a strategy. The strategy carried out is in the form of advocacy with an inclusive citizenship approach. It is hoped that with this approach, awareness of various social realities can be created, and the will to recognize and live out differences in order to open equal opportunities for every citizen. The struggle carried out by the Sapta Darma group has begun to bear fruit, such as being recognized and accepted by the community, and being able to access various public services. However, the struggle for the identity politics of the Sapta Darma group did not stop after the Constitutional Court decision regarding the *adminduk*, because there were still public services that were not yet accessible to worshipers, namely related to funeral services.*

Keywords: *identity politics, struggle, discrimination, Sapta Darma*